

Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang

Rafiuddin[✉], Abdul Rahman Mus², Nur Alam³

Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data pada penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai Sekretariat DPRD, Badan Keuangan Daerah, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang. Penarikan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh sebanyak 80 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif serta analisis regresi linear berganda melalui bantuan program SPSS versi 26.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik akuntabilitas maupun transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Secara simultan, kedua variabel independen tersebut juga memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor penting dalam mendorong kinerja yang lebih efektif dan efisien di lingkungan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Pemerintah Daerah, Keuangan Daerah

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of accountability and transparency in regional financial management on the performance of the Government of Pinrang Regency. The research adopts a quantitative approach with an associative research design. Data were obtained through questionnaires distributed to employees of the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD), the Regional Financial Agency, and the Regional Inspectorate of Pinrang Regency. The sample was selected using purposive sampling, resulting in a total of 80 respondents. The data were analyzed using descriptive statistical analysis and multiple linear regression, with the assistance of SPSS version 26.0. The results indicate that both accountability and transparency have a positive and significant influence on the performance of the regional government. Simultaneously, these two independent variables also have a significant effect on improving government performance. These findings affirm that strengthening accountability and transparency in regional financial management plays a crucial role in promoting more effective and efficient performance within the local government.

Keywords: *Accountability, Transparency, Government Performance, Regional Financial Management*

Copyright (c) 2025 **Rafiuddin**

✉ Corresponding author :

Email Address : fiedien11@gmail.com

PENDAHULUAN

Isu kinerja pemerintah daerah menjadi sorotan publik karena hasilnya belum dirasakan optimal oleh masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah dituntut menunjukkan kinerja yang baik demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Menurut Mahsun (2006, 2016), kinerja pemerintah mencerminkan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi serta hasil dari pengelolaan input dan proses yang dilakukan.

Akbar (2012) menyatakan bahwa reformasi menuntut penerapan akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari prinsip good governance. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tindakan dan hasil kerja, sementara transparansi menekankan keterbukaan informasi, khususnya dalam pengelolaan keuangan publik. Penelitian sebelumnya (Nasution, 2017; Wiguna, 2015; Riswanto, 2016) menunjukkan bahwa kedua aspek ini berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Di Kabupaten Pinrang, visi pemerintah daerah adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, religius, dan mandiri. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah masih belum memenuhi harapan masyarakat, terutama karena lemahnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Masih rendahnya keterbukaan informasi publik mengenai penggunaan dana serta pertanggungjawabannya menjadi sorotan utama.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul: "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pinrang."

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis asosiatif untuk menganalisis hubungan antara akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Pinrang. (Sugiyono, 2016).

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pemerintah Kabupaten Pinrang pada 26 Februari – 22 Maret 2025. Lokasi ini dipilih karena menjadi pusat pengelolaan keuangan daerah dan memiliki instansi yang relevan, seperti Sekretariat DPRD, BKD, dan Inspektorat.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan terdiri dari:

1. Data kualitatif (informasi non-numerik),
2. Data kuantitatif (berbentuk angka).

Sumber data meliputi:

1. Primer : dari kuesioner responden,
2. Sekunder : dokumen dan literatur pendukung.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup pegawai dari tiga instansi di Kabupaten Pinrang yang berperan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu Sekretariat DPRD, Badan Keuangan Daerah, dan Inspektorat Daerah. Responden adalah pegawai yang bertugas di bagian pembukuan, akuntansi, atau keuangan, dengan pengalaman kerja minimal satu tahun.

Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2016). Sampel terdiri dari pejabat eselon III dan IV seperti Kepala Dinas, Sekretaris, Bendahara, dan staf yang relevan. Adapun jumlah total responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 80 orang, yang ditentukan melalui pendekatan

purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Proses seleksi sampel secara rinci disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Seleksi Sampel Responden dengan Teknik *Purposive Sampling*

No	Tahapan Seleksi	Jumlah
1	Total populasi pegawai dari tiga instansi (DPRD, BKD, dan Inspektorat Daerah)	139
2	Tidak bertugas di bagian pembukuan/akuntansi	(18)
3	Masa kerja kurang dari 1 tahun	(14)
4	Jabatan tidak sesuai (non-eselon III/IV atau tidak relevan)	(17)
Pegawai yang memenuhi kriteria <i>purposive sampling</i>		80

Sumber: Website resmi Pemerintah Kabupaten Pinrang

Tabel di atas menunjukkan proses seleksi responden dari 139 pegawai di tiga instansi. Setelah diseleksi berdasarkan kriteria tertentu, diperoleh 80 pegawai yang memenuhi syarat dan layak dijadikan responden.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden dengan cara sebagai berikut:

1. Kuesioner : untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel penelitian.
2. Dokumentasi : untuk memperoleh data pendukung dari dokumen dan arsip.

Teknik Analisis Data

Data Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh sekaligus untuk menguji hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menilai apakah item pertanyaan dalam kuesioner telah sesuai dan tepat dalam mengukur variabel yang dimaksud (Sunjoyo, 2013).

b. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden. Kuesioner dianggap reliabel jika nilai Cronbach's Alpha > 0,60 (Ghozali, 2018).

c. Analisis deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah.

d. Analisis inferensial dengan alat analisis regresi berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel akuntabilitas (X_1) dan transparansi (X_2) terhadap kinerja pemerintah daerah (Y), dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Supardi (2013 : 239) sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

di mana :

Y = Kinerja Pemerintah Daerah X_2 = Transparansi

X_1 = Akuntabilitas β_0 = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi

2. Pengujian Hipotesis

Pembuktian hipotesis tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik yang terdiri dari uji serempak (uji f) dan uji parsial (uji t) yaitu sebagai berikut :

- a. Uji serempak (Uji F)

Uji serempak (Uji F) bertujuan mengetahui apakah variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} pada $\alpha = 0,05$. Jika nilai $F_{hitung} \geq$ dari nilai F_{tabel} maka berarti variabel bebasnya secara bersama-sama memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat.

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ pada $\alpha = 0,05$, maka variabel bebasnya memberikan pengaruh bermakna terhadap variabel terikat.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 mendekati 1 berarti pengaruhnya besar, sedangkan mendekati 0 berarti pengaruhnya lemah.

Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan cara mengukur variabel penelitian melalui indikator tertentu.

1. Variabel Terikat (Y) - Kinerja Pemerintah Daerah

Mengacu pada Halim (2016), diukur melalui:

a) Ekonomi, b) Efisiensi, c) Efektivitas.

2. Variabel Bebas:

a. Akuntabilitas (X1) - Kewajiban pengelolaan dan pelaporan penggunaan sumber daya public. Indikator yang digunakan menurut Mahmudi (2016) :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran | 4. Akuntabilitas Kebijakan |
| 2. Akuntabilitas Manajerial | 5. Akuntabilitas Finansial |
| 3. Akuntabilitas Program | |

b. Transparansi (X2) - Keterbukaan informasi dan kebijakan (Krina, 2013). Indikator yang digunakan menurut Mardiasmo (2018) :

1. Informatif (*Invormativeness*)
2. Keterbukaan (*Openness*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden menggambarkan profil pegawai dari tiga instansi di Kabupaten Pinrang yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu Sekretariat DPRD, Badan Keuangan Daerah, dan Inspektorat. Sebanyak 80 responden dipilih dengan kriteria minimal satu tahun masa kerja. Seluruh kuesioner dikembalikan sehingga data dapat diolah sepenuhnya. Klasifikasi responden disajikan berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, masa kerja, dan status, untuk mempermudah analisis dan interpretasi hasil penelitian.

a) Identitas Responden Berdasarkan Umur

Kategori umur responden mencerminkan tingkat kedewasaan dan pengalaman kerja yang dapat memengaruhi kinerja mereka. Rinciannya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Umur

No	Rentang Usia	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	< 25 tahun	0	0
2	25-30 Tahun	1	1,25
3	31-40 Tahun	17	21,25
4	41-49 Tahun	54	67,5

5	≥50 Tahun	8	10,0
	Total	80	100

Sumber: Hasil olahan data, 2025.

Berdasarkan Tabel 2, yakni deskripsi identitas responden berdasarkan umur, mayoritas dari 80 responden berada pada rentang usia 41–49 tahun, yaitu sebanyak 54 orang (67,5%). Disusul oleh kelompok usia 31–40 tahun sebanyak 17 orang (21,25%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai pada tiga instansi tersebut di Kabupaten Pinrang berada pada usia produktif dan matang, yang secara umum dipandang mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah.

b) Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden diklasifikasikan menjadi dua kelompok, pria dan wanita. Rinciannya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Pria	39	48,75
2	Wanita	41	51,25
	Total	80	100

Sumber: Hasil olahan data, 2025.

Berdasarkan Tabel 3, yaitu identitas responden berdasarkan jenis kelamin, dari total 80 responden yang menjadi sampel penelitian, terdapat 39 orang pria (48,75%) dan 41 orang wanita (51,25%). Hal ini menunjukkan bahwa pegawai pada tiga instansi di Kabupaten Pinrang didominasi oleh wanita, meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan.

c) Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan terakhir responden dapat memengaruhi pencapaian tugas dan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Rinciannya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

No	Tingkat Pendidikan Terakhir	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	SMA	7	8,75
2	D3	1	1,25
3	S1	32	52,5
4	S2	40	37,5
	Total	80	100

Sumber: Hasil olahan data, 2025.

Berdasarkan Tabel 4, kelompok responden terbanyak adalah lulusan Strata 1 (S1), dengan jumlah 42 orang atau 52,5% dari total responden. Kemudian sebanyak 30 orang (37,5%) merupakan lulusan Strata 2 (S2). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai yang bekerja pada tiga instansi di Kabupaten Pinrang merupakan lulusan pendidikan tinggi, dengan dominasi lulusan S1, yang secara umum mendukung kompetensi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.

d) Identitas Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa kerja menunjukkan lamanya responden mengabdikan di instansi masing-masing. Rinciannya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja

No	Masa Kerja	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	< 3 tahun	2	2,5
2	3,1 - 5 tahun	0	0
3	5,1 - 10 tahun	14	17,5
4	> 10 tahun	64	80
	Total	80	100

Sumber: Hasil olahan data, 2025.

Berdasarkan Tabel 5, mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki masa kerja di atas 10 tahun, yaitu sebanyak 64 orang (80%). Sebanyak 14 responden (17,5%) memiliki masa kerja antara 5,1-10 tahun, sedangkan 2 orang (2,5%) memiliki masa kerja kurang dari 3 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai pada tiga instansi di Kabupaten Pinrang merupakan individu yang telah berpengalaman, dengan masa kerja yang cukup panjang, sehingga diperkirakan memiliki pemahaman yang baik terhadap sistem dan tata kelola keuangan daerah.

e) Identitas Responden Berdasarkan Status Pernikahan

Status perkawinan responden dibagi menjadi dua kategori, menikah dan belum menikah. Rinciannya ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 6. Distribusi Responden Berdasarkan Status Pernikahan

No	Status	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Menikah	77	96,25
2	Belum Menikah	3	3,75
	Total	80	100

Sumber: Hasil olahan data, 2025.

Berdasarkan Tabel 6, dari total 80 responden yang diteliti, mayoritas berstatus menikah yaitu sebanyak 77 orang (96,25%). Sementara itu, hanya 3 orang (3,75%) yang berstatus belum menikah. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai pada tiga instansi di Kabupaten Pinrang telah memiliki kehidupan keluarga, yang dapat mencerminkan tingkat kedewasaan dan stabilitas sosial dalam menjalankan tugas pemerintahan.

2. Deskripsi Distribusi Tanggapan Responden terhadap Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Pemerintah Daerah

Penelitian ini menyajikan gambaran data lapangan untuk mengetahui persepsi responden terhadap variabel akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan kinerja pemerintah daerah (Y) di Kabupaten Pinrang. Data diperoleh dari 80 responden melalui kuesioner berskala Likert lima poin, yaitu:

Sangat Setuju (SS)	= 5	Tidak Setuju (TS)	= 2
Setuju (S)	= 4	Sangat Tidak Setuju (STS)	= 1.
Ragu-ragu (RR)	= 3		

Persepsi responden terhadap masing-masing variabel akan dijelaskan dalam uraian berikut :

a) Persepsi Responden terhadap Akuntabilitas

Akuntabilitas sektor publik bertujuan menjamin pertanggungjawaban penggunaan dana masyarakat. Persepsi responden terkait akuntabilitas ditampilkan pada Tabel berikut :

Tabel 7. Distribusi Responden Berdasarkan Akuntabilitas

Item	Frekuensi Skor & Persentase					N	Total Skor	Rata-rata
	STS	TS	RR	S	SS			
a. X1.1								
X1.1.1	1 (1,3)	-	2 (2,5)	61 (76,3)	16 (20)	80 (100)	331	4,14
X1.1.2	-	2 (2,5)	3 (3,8)	58 (72,5)	17 (21,3)	80 (100)	330	4,13
b. X1.2								
X1.2.1	-	-	9 (11,3)	46 (57,5)	25 (31,3)	80 (100)	336	4,20
X1.2.2	3 (3,8)	4 (5,0)	8 (10)	37 (46,3)	28 (35)	80 (100)	323	4,04
c. X1.3								
X1.3.1	-	3 (3,8)	6 (7,5)	47 (58,8)	24 (30,0)	80 (100)	332	4,15
X1.3.2	-	2 (2,5)	9 (11,3)	56 (70)	13 (16,3)	80 (100)	320	4,00
d. X1.4								
X1.4.1	2 (2,5)	-	1 (1,3)	65 (81,3)	12 (15,0)	80 (100)	325	4,06
X1.4.2	1 (1,3)	2 (2,5)	1 (1,3)	60 (75)	16 (20)	80 (100)	328	4,10
e. X1.5								
X1.5.1	-	2 (2,5)	10 (12,5)	40 (50)	28 (35)	80 (100)	334	4,18
X1.5.2	1 (1,3)	2 (2,5)	1 (1,3)	59 (73,8)	17 (21,3)	80 (100)	329	4,11
Mean Variabel Akuntabilitas								4,11

Sumber: Lampiran SPSS, 2025.

Berdasarkan Tabel 7, tanggapan dari 80 responden terhadap item pernyataan mengenai Akuntabilitas menunjukkan bahwa skor 4 (Setuju) merupakan jawaban yang paling banyak dipilih pada hampir seluruh item, yaitu item X1.1.1 dengan 61 responden, dan X1.4.1 sebanyak 65 responden. Sebaliknya, skor rendah seperti 1 (Tidak Setuju) hanya muncul dalam jumlah yang sangat sedikit. Jumlah nilai rata-rata keseluruhan dari 10 pernyataan yaitu sebesar 4,11, berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban Setuju.

b) Persepsi Responden terhadap Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan informasi keuangan sebagai bentuk hak publik atas pertanggungjawaban pemerintah. Persepsi responden terkait transparansi ditampilkan pada Tabel berikut :

Tabel 8. Distribusi Responden Berdasarkan Transparansi

Item	Frekuensi Skor & Persentase					N	Total Skor	Rata-rata
	STS	TS	RR	S	SS			
a. X2.1								
X2.1.1	3 (3,8)	-	13 (16,3)	45 (56,3)	19 (23,8)	80 (100)	317	3,96
X2.1.2	-	1 (1,3)	12 (15)	51 (63,7)	16 (20)	80 (100)	322	4,03
b. X2.2								
X2.2.1	3 (3,8)	2 (2,5)	1 (1,3)	54 (67,5)	20 (25)	80 (100)	326	4,08
X2.2.2	-	1 (1,3)	15 (18,8)	48 (60)	16 (20)	80 (100)	319	3,99
Mean Variabel Transparansi								4,01

Preranan SPSS, 2025.

Berdasarkan Tabel 8, tanggapan dari 80 responden terhadap item pernyataan mengenai Transparansi menunjukkan bahwa skor 4 (Setuju) mendominasi pilihan responden, yaitu pada item X2.1.2 dipilih oleh 51 responden dan item X2.2.1 oleh 54 responden. Sebaliknya, hanya sedikit responden yang memberikan penilaian dengan skor 1 atau 2. Jumlah nilai rata-rata keseluruhan dari 4 pernyataan yaitu sebesar 4,01, berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban Setuju.

c) Persepsi Responden terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah mencerminkan pencapaian tujuan organisasi serta hasil kontribusi anggotanya. Persepsi responden terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Pinrang disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 9. Distribusi Responden Berdasarkan Kinerja Pemerintah Daerah

	Item	Frekuensi Skor & Persentase					N	Total Skor	Rata-rata
		STS	TS	RR	S	SS			
a.	Y1								
	Y1.1	1 (1,3)	3 (3,8)	-	54 (67,5)	22 (27,5)	80 (100)	333	4,16
	X1.2	-	3 (3,8)	7 (8,8)	53 (66,3)	17 (21,3)	80 (100)	324	4,05
b.	Y2								
	Y2.1	2 (2,5)	2 (2,5)	-	60 (75)	16 (20)	80 (100)	326	4,08
	Y2.2	1 (1,3)	1 (1,3)	5 (6,3)	55 (68,8)	18 (22,5)	80 (100)	328	4,10
C.	Y3								
	Y3.1	-	4 (5,0)	2 (2,5)	60 (75)	14 (17,5)	80 (100)	324	4,05
	Y3.2	2 (2,5)	1 (1,3)	5 (6,3)	57 (71,3)	15 (18,8)	80 (100)	322	4,03
Mean Variabel Kinerja Pemerintah Daerah								4,08	

Sumber: Lampiran SPSS, 2025.

Berdasarkan Tabel 9, tanggapan dari 80 responden terhadap item pernyataan mengenai Kinerja Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa skor 4 (Setuju) merupakan jawaban yang paling banyak dipilih pada hampir seluruh item, yaitu pada item Y2.1 sebanyak 60 responden, dan Y3.1 sebanyak 60 responden. Tanggapan dengan nilai 1 atau 2 tercatat dalam frekuensi yang sangat rendah. Jumlah nilai rata-rata keseluruhan dari 6 pernyataan yaitu sebesar 4,08, berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban Setuju.

3. Uji Instrumen Penelitian

Penelitian ini melibatkan 80 responden dari tiga instansi di Kabupaten Pinrang yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan daerah. Dengan tingkat pengembalian kuesioner 100%, selanjutnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan instrumen yang digunakan mampu mengukur variabel secara tepat dan konsisten. Hasil uji disajikan sebagai berikut:

a) Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menilai sejauh mana setiap item kuesioner mampu secara akurat mengukur variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, uji dilakukan melalui korelasi antara skor tiap item dan skor total, dengan koreksi koefisien korelasi untuk menghindari overestimasi. Berdasarkan Sugiyono (2017:143), item dinyatakan valid jika nilai korelasinya $\geq 0,30$. Hasil uji validitas untuk variabel akuntabilitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 10. Uji Validitas Item Pernyataan Akuntabilitas

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{kritis}	Keputusan
X _{1.1.1}	0,508	0,30	Valid
X _{1.1.2}	0,645	0,30	Valid
X _{1.2.1}	0,459	0,30	Valid
X _{1.2.2}	0,702	0,30	Valid
X _{1.3.1}	0,308	0,30	Valid
X _{1.3.2}	0,515	0,30	Valid
X _{1.4.1}	0,689	0,30	Valid
X _{1.4.2}	0,460	0,30	Valid
X _{1.5.1}	0,503	0,30	Valid
X _{1.5.2}	0,750	0,30	Valid

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 10, yaitu hasil uji validitas terhadap 10 item pernyataan pada variabel akuntabilitas menunjukkan bahwa kisaran korelasi 0,308-0,750, hal ini menunjukkan kesepuluh item pernyataan memiliki kisaran korelasi yang lebih besar dari 0,30. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap butir pernyataan sudah dinyatakan valid. Kemudian hasil uji validitas untuk variabel transparansi dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 11. Uji Validitas Item Pernyataan Transparansi

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{kritis}	Keputusan
X _{2.1.1}	0,632	0,30	Valid
X _{2.1.2}	0,419	0,30	Valid
X _{2.2.2}	0,305	0,30	Valid

Sumber : Data diolah, 2025

Catatan: Item pernyataan X_{2.2.1} telah dihilangkan dari tabel karena tidak memenuhi syarat validitas ($r_{hitung} < r_{kritis}$).

Berdasarkan Tabel 11, yaitu hasil uji validitas terhadap 4 item pernyataan pada variabel transparansi menunjukkan bahwa tiga dari empat item memiliki nilai korelasi di atas 0,30. Satu butir pernyataan, yaitu X2.2.1, memiliki nilai korelasi 0,254 yang berada di bawah batas minimal, sehingga dinyatakan tidak valid. Dengan demikian, hanya tiga item yang layak digunakan untuk mengukur variabel transparansi dalam penelitian ini. Selanjutnya akan ditampilkan uji validitas untuk kinerja pemerintah daerah yang dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 12. Uji Validitas Item Pernyataan Kinerja Pemerintah Daerah

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{kritis}	Keputusan
Y _{1.1}	0,834	0,30	Valid
Y _{2.1}	0,570	0,30	Valid
Y _{2.1}	0,355	0,30	Valid
Y _{2.2}	0,646	0,30	Valid
Y _{3.1}	0,733	0,30	Valid
Y _{3.2}	0,658	0,30	Valid

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 12, yaitu hasil uji validitas terhadap 6 item pernyataan pada variabel Kinerja Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai korelasi di atas 0,30, dengan kisaran nilai antara 0,355 hingga 0,834. Hal ini menunjukkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan valid karena telah memenuhi syarat minimal nilai korelasi. Dengan demikian, seluruh item dapat digunakan untuk mengukur variabel kinerja dalam penelitian ini.

Setelah dilakukan uji validitas terhadap seluruh item pada variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Pemerintah Daerah, sebagian besar item menunjukkan nilai korelasi > 0,30, sehingga dinyatakan valid. Namun, satu item pada variabel Transparansi (X2.2.1) memiliki nilai korelasi 0,254 dan dinyatakan tidak valid. Oleh karena itu, hanya item yang memenuhi kriteria validitas yang digunakan dalam analisis selanjutnya.

b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi suatu instrumen dalam menghasilkan data yang stabil jika digunakan kembali dalam kondisi serupa. Dalam penelitian ini, reliabilitas diuji menggunakan teknik *Cronbach's Alpha* melalui SPSS. Berdasarkan kriteria Ghazali (2018), instrumen dinyatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70. Hasil uji reliabilitas masing-masing variabel disajikan pada tabel berikut :

Tabel 13. Analisis Uji Reliabilitas

No	Variabel Penelitian	Item Pernyataan	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Cronbach's Alpha standar</i>	Kesimpulan
1	Akuntabilitas	10	0,846	0,70	Reliabel
2	Transparansi	3	0,677	0,70	Cukup Reliabel
3	Kinerja pemerintah daerah	6	0,845	0,70	Reliabel

Sumber : Data diolah, 2025

Catatan: Item X_{2.2.1} pada variabel transparansi dikeluarkan dari analisis reliabilitas karena tidak memenuhi kriteria validitas ($r < 0,30$).

Berdasarkan Tabel 13, seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,70$ atau mendekatinya, yang menunjukkan bahwa instrumen dinyatakan reliabel. Variabel Akuntabilitas (10 item) memiliki nilai 0,846; Kinerja Pemerintah Daerah (6 item) sebesar 0,845; dan Transparansi (3 item), meski sedikit di bawah standar (0,677), masih dianggap cukup reliabel dalam konteks sosial dengan jumlah item terbatas. Dengan demikian, semua item layak digunakan dalam analisis lanjutan.

4. Analisis Regresi dan Korelasi Linear Berganda

Analisis regresi dan korelasi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) terhadap kinerja pemerintah daerah (Y). Pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS, dengan hasil yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14. Analisis Regresi dan Korelasi Linear Berganda Mengenai Akuntabilitas, Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.143	2.623	-	1.579	.118
	Akuntabilitas (X1)	.370	.070	.529	5.256	.000
	Transparansi (X2)	.317	.153	.209	2.078	.041

a. *Dependent Variable:* Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Tabel 14 merupakan hasil uji regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Pinrang, yang menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

$$Y = 4,143 + 0,370X_1 + 0,317X_2$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat diberikan interpretasi sebagai berikut:

1. $\beta_0 = 4,143$ yang dapat diartikan jika akuntabilitas (X_1) dan transparansi (X_2) dianggap konstan atau sama dengan nol, maka nilai kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pinrang adalah sebesar 4,143. Nilai ini merupakan nilai konstanta dasar dari model regresi.
2. $\beta_1 X_1 = 0,370$ artinya setiap kenaikan 1 poin pada variabel akuntabilitas akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah sebesar 0,370 poin, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas, maka akan semakin meningkat pula kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pinrang.
3. $\beta_2 X_2 = 0,317$ artinya, setiap kenaikan 1 poin pada variabel transparansi akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah sebesar 0,317 poin, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Dengan demikian, semakin tinggi transparansi pengelolaan keuangan, maka akan semakin meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pinrang.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, maka kinerja Pemerintah Kabupaten Pinrang akan semakin meningkat.

5. Koefisien Determinasi

Kemudian untuk mengetahui seberapa besar kekuatan atau kelemahan variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah maka dapat dilihat dari hasil nilai koefisien korelasi yang dapat disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 15. Analisis Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.665 ^a	.442	.428	2.35837

a. Predictors: (Constant), Transparansi (X2), Akuntabilitas (X1)

Berdasarkan Tabel 15, yang merupakan hasil analisis koefisien korelasi dan determinasi, diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,665. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah, karena nilai R mendekati angka 1. Sementara itu, koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,442 menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel bebas (akuntabilitas dan transparansi) terhadap variabel terikat (kinerja pemerintah daerah) adalah sebesar 44,2%. Adapun sisanya sebesar 55,8% ($1 - 0,442 \times 100$) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

6. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis maka dapat dilakukan 2 pengujian yakni uji parsial (uji t) dan uji serempak (uji F). Hasil pengujian parsial dari masing-masing variabel bebas yang diteliti dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan nilai $t = 5,256$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima.

2) Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan nilai $t = 2,078$ dengan signifikansi $0,041 < 0,05$, sehingga transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima.

Kemudian untuk menguji pengaruh secara serempak atau bersama-sama antara variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah maka digunakan pengujian simultan (Uji F), yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 16. Uji Serempak (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	339.622	2	169.811	30.531	.000 ^b
	Residual	428.265	77	5.562		
	Total	767.887	79			

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

b. Predictors: (Constant), Transparansi (X2), Akuntabilitas (X1)

Berdasarkan Tabel 16, yang merupakan hasil uji simultan (Uji F), diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 30,531 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas dan transparansi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pinrang.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diketahui bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. Jika dikaji lebih dalam berdasarkan indikatornya, akuntabilitas yang mencakup aspek hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, program, kebijakan, dan finansial menunjukkan bahwa responden umumnya menilai pemerintah daerah cukup baik dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan program dan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tercermin dari tingginya penilaian responden terhadap pelaporan kredibel dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, indikator seperti integritas keuangan dan kejelasan akuntabilitas kebijakan masih perlu diperkuat, karena sebagian responden menyatakan keraguan terhadap transparansi dan dampak kebijakan jangka panjang.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mikael Edowai et al. (2021) di Kabupaten Deiyai serta Riswanto (2016) di Kabupaten Jember, yang sama-sama menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. Keselarasan ini juga terlihat dalam lingkup yang lebih mikro. Penelitian oleh Ulfa et al. (2022) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan di Kantor DPRD Kabupaten Enrekang, menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang sehat dan efisien. Sementara itu, dalam konteks pengawasan internal, Hilman et al. (2021) membuktikan bahwa akuntabilitas auditor memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hasil audit di Inspektorat Makassar. Artinya, akuntabilitas tidak hanya memengaruhi tahapan perencanaan dan pelaksanaan program, tetapi juga sangat krusial dalam aspek pengawasan dan evaluasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan dalam ranah pendidikan tinggi, penelitian Jumriani et al. (2022) menunjukkan bahwa penerapan *good university governance* yang mengedepankan akuntabilitas turut meningkatkan kualitas layanan dan kredibilitas institusi. Temuan ini mempertegas bahwa akuntabilitas merupakan prinsip dasar yang esensial, baik dalam sektor pendidikan maupun pemerintahan, khususnya dalam membangun kepercayaan publik dan mewujudkan pertanggungjawaban kebijakan secara nyata.

Namun, tidak semua penelitian menunjukkan hasil serupa. Sebagai contoh, penelitian Fanny Jitmau dkk (2017) di Kabupaten Sorong mengungkapkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa keberhasilan akuntabilitas dalam mendorong kinerja sangat tergantung pada konteks lokal, termasuk tingkat komitmen pejabat, sistem pelaporan yang berjalan, serta keterbukaan internal terhadap evaluasi.

Akuntabilitas terbukti berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh penerapan nyata dan berkesinambungan. Perbedaan hasil studi menunjukkan bahwa lingkungan sosial, budaya organisasi, dan tata kelola internal turut memengaruhi efektivitasnya. Karena itu, perlu dukungan kepemimpinan dan regulasi yang mendorong akuntabilitas yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang

Berdasarkan hasil analisis data, transparansi juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. Dalam penelitian ini, transparansi diukur melalui beberapa indikator, yaitu: *informativeness*, *openness*, dan *disclosure*. Masing-masing indikator menekankan keterbukaan dalam penyajian informasi keuangan, kemudahan akses, serta kejelasan struktur organisasi dan rencana kegiatan.

Berdasarkan tanggapan responden, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang telah menunjukkan usaha yang baik dalam aspek keterbukaan informasi. Responden mengakui adanya media informasi resmi, baik daring (dalam jaringan/*online*) maupun luring (luar jaringan/*offline*), yang memungkinkan publik mengakses data keuangan pemerintah. Namun demikian, indikator partisipasi publik dan akses langsung terhadap perencanaan anggaran masih menunjukkan kelemahan. Masyarakat merasa belum sepenuhnya dilibatkan dalam pengawasan atau evaluasi pelaksanaan anggaran daerah. Ini menjadi penting karena keterbukaan informasi tanpa partisipasi publik aktif hanya akan menghasilkan transparansi pasif, bukan transparansi partisipatif yang sesungguhnya.

Temuan ini mendukung hasil penelitian Adiwirya dan Sudana (2015) serta Zulkifli Umar et al. (2018) yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap efisiensi dan kredibilitas laporan keuangan, sehingga berdampak positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, Effendy et al. (2022) dalam penelitiannya tentang pengaruh partisipasi anggaran dan transparansi terhadap kinerja keuangan daerah di Indonesia, menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan dan efektivitas anggaran. Dalam konteks ini, transparansi menjadi salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama ketika diikuti dengan partisipasi publik yang aktif dan sistem informasi yang mudah diakses. Namun, jika dibandingkan dengan penelitian Toni Nurhadianto dkk (2019) yang menunjukkan rendahnya transparansi keuangan di sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Lampung, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pinrang telah berada pada arah yang lebih progresif, meskipun tetap ada perbaikan yang diperlukan dalam hal memperkuat keterlibatan publik dan memperluas saluran komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Efektivitas transparansi tidak hanya ditentukan oleh keterbukaan informasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun interaksi yang terbuka dan berkelanjutan dengan masyarakat. Jika transparansi disertai ruang dialog dan partisipasi publik dalam pengawasan, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif pada kinerja pemerintah.

Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang

Secara simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, maka semakin baik pula kinerja yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kinerja pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur berdasarkan pendekatan *value for money*, yaitu meliputi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dari data yang diperoleh, secara umum masyarakat menilai bahwa kinerja pemerintah daerah telah cukup baik, terutama dalam hal pencapaian *output* program dan pelayanan publik. Misalnya, program-program pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan telah

dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Ini mencerminkan tercapainya indikator efektivitas.

Namun demikian, dari sisi efisiensi dan ekonomi, masih terdapat keluhan tentang penggunaan anggaran yang tidak optimal, terutama dalam proyek-proyek berskala besar yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat. Terdapat persepsi pemborosan anggaran, serta minimnya evaluasi terhadap *output* yang dihasilkan dari belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas fiskal dan keterbukaan terhadap audit publik masih harus diperkuat.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Thahir et al. (2024) yang menyebutkan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan faktor penting dalam mendorong kinerja keuangan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Dalam penelitian tersebut, kedua variabel ini mampu memperbaiki outcome fiskal pemerintah, terutama melalui peningkatan trust publik dan efektivitas anggaran. Begitu pula Rusdi dan Mursalim (2019) menyimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi yang konsisten berkontribusi terhadap peningkatan kinerja lembaga publik secara menyeluruh. Mereka menekankan pentingnya transparansi informasi keuangan, integritas dalam pelaporan, serta kepatuhan terhadap regulasi sebagai bagian dari sistem yang saling terkait dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menguatkan teori tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi serta membuktikan secara empiris bahwa keduanya dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah, terutama jika disertai sistem pengawasan dan evaluasi yang terukur. Kabupaten Pinrang dinilai sudah berada di jalur yang tepat, meskipun masih perlu ditingkatkan partisipasi publik dan pengawasan masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. Artinya, semakin tinggi tingkat akuntabilitas dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, maka semakin meningkat pula kinerja pemerintah. Akuntabilitas dipersepsikan positif oleh responden, terutama dalam aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Demikian pula transparansi, dinilai baik oleh responden dan memberikan kontribusi nyata terhadap persepsi positif atas kinerja instansi. Secara simultan, kedua variabel ini memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat akuntabilitas melalui pelaporan dan pengawasan anggaran yang lebih baik, serta meningkatkan keterbukaan informasi publik lewat berbagai saluran komunikasi. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel lain seperti integritas, partisipasi masyarakat, atau kepemimpinan guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh terkait kinerja pemerintah daerah.

Referensi :

- Abdul Karim, R., & Mursalim, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Keuangan. *Paradoks Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 40–49.
- Adiwirya dan Sudana (2015) Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *Jurnal Akuntansi Home Archives*, Home Vol.2 No.2 (2015)
- Fanny Jitmau, dkk (2017) Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong)

Jurnal Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.

- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hilman, N., Laekkeng, M., & Amiruddin, A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Skeptisme Profesional, Kompetensi Auditor, dan E-Audit Terhadap Kualitas Hasil Audit pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar. *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 3(2), 303-322.
- Jumriani, Masdar Mas'ud, & Nurwanah. (2022). Analisis Penerapan Good University Governance Bagi Akuntabilitas Publik. *Journal of Accounting Finance (JAF)*, 3(1), 124-142.
- Mikael Edowati, et al. (2021) Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. *Journal of Business and Management*, 4(1), Desember 2021, Halaman: 87-96. e-ISSN: 2460-3767. p-ISSN: 2656-6885
- Nasution, D. A. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 149-162.
- Pemerintah Kabupaten Pinrang. (2022). *Visi dan Misi Kabupaten Pinrang*. Diakses dari: <https://ppid.pinrangkab.go.id>
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang. (2022). *Profil Visi dan Misi*. Diakses dari: <https://pmptsp.pinrangkab.go.id>
- Retnowati, E. (2012). Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen). *Perspektif*, 17(1).
- Riswanto, Natak, (2016) Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Artikel Ilmiah Mahasiswa <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/75336>
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Penerbit : Alfabeta, Bandung
- Syafira Ahmad, Abdul Rahman Mus, Musliha Shaleh, & Muslim Muslim. (2023). Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Perusahaan. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2), 128-141. e-ISSN: 2622-6383.
- Thahir, A. G., Mus, A. R., Ramlawati, & Nur, A. N. (2024). Effect of budget participation, transparency, and internal control on accountability and local government financial performance in Bulukumba Regency. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(5), 1-19. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n5-171>
- Toni Nurhadianto, dkk (2019) Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah : Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. *Jurnal Technobiz* Vol. 3, No. 5, 2019, 25-30. ISSN 2655-3457.
- Ulfa, A., Mus, A. R., Subhan, M., Abduh, M., & Wahyuni, N. (2022). Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Kantor DPRD Kabupaten Enrekang. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(2), 84-91.
- Wiguna, B. S., Yuniartha, G. A., Ari, N., & Darmawan, S. (2015). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Tranparasni Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
- Zulkifli Umar, dkk (2018) Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Kolegial* Vol.6, No.2. Desember 2018 P-ISSN 2088-5644; E-ISSN 2614-008X.